

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memasuki era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin kompetitif *Corporate Governance* yang baik telah menjadi kebutuhan mendasar bagi perusahaan. Meski telah lama menjadi isu yang mengemuka pelaksanaan *Corporate Governance* belum diterapkan secara sepenuhnya di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip *Corporate Governance*. Penerapan *corporate governance* pada saat ini bukan lagi sekedar kewajiban, namun telah menjadi kebutuhan bagi setiap perusahaan dan organisasi. *Corporate Governance* yang baik diperlukan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan, menjadikan perusahaan berumur panjang dan bisa dipercaya.

Kebutuhan akan praktik- praktik *corporate governance* yang baik adalah sebagai akibat terjadinya kebangkrutan perusahaan perusahaan ternama, baik disektor keuangan maupun non - keuangan. Secara global berbagai isu yang berhubungan dengan *corporate governance* menguat kembali setelah runtuhnya beberapa raksasa bisnis dunia seperti Enron dan WorldCom di AS. Penyebab krisis keuangan yang melanda di berbagai negara, terutama di Asia, tidak lain adalah karena buruknya pelaksanaan praktik-praktik *corporate governance*. Dalam hal ini Indonesia merupakan negara yang paling menderita serta paling lambat bangkit dari dampak krisis tersebut.

Rendahnya *corporate governance*, hubungan investor yang lemah, kurangnya tingkat transparansi, ketidak efisienan dalam laporan keuangan, dan masih kurangnya penegakan hukum atas perundang-undangan dalam menghukum pelaku dan melindungi pemegang saham minoritas, menjadi pemicu

dan alasan beberapa perusahaan di Indonesia runtuh (Hardikasari, 2011). Akumulasi permasalahan yang terjadi ini menyebabkan timbulnya perhatian yang besar terhadap kebutuhan untuk meningkatkan kepedulian terhadap standar pengelolaan perusahaan, meningkatkan transparansi dan memperbaiki hubungan investor, lembaga regulator seperti BAPEPAM dan BEI harus menekan pentingnya penegakan hukum yang lebih efektif

Tujuan *corporate governance* yang baik pada intinya adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal yang meliputi dewan komisaris, direksi, karyawan, dan pihak eksternal yang meliputi investor kreditur, pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*). Namun dalam praktiknya, *corporate governance* berbeda di setiap negara dan perusahaan karena berkaitan dengan sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya.

Penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* yaitu *transparency*, *accountability*, *fairness*, dan *responsibility* merupakan upaya agar tercipta keseimbangan antar kepentingan dari para *stakeholder* yaitu pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas, kreditur, manajemen perusahaan, karyawan perusahaan, *suppliers*, pemerintah, konsumen, dan tentunya para anggota masyarakat yang merupakan indikator tercapainya keseimbangan kepentingan, sehingga benturan kepentingan yang terjadi dapat diarahkan dan dikontrol serta tidak menimbulkan kerugian bagi masing-masing pihak.

Terdapat empat mekanisme *corporate governance* yang sering dipakai dalam berbagai penelitian mengenai *corporate governance* yang bertujuan untuk mengurangi konflik keagenan, yaitu komisaris independen, komite audit,

kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Noviawan dan Septiani (2013), Teori keagenan menyatakan bahwa konflik kepentingan dan asimetri informasi yang timbul dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan dari berbagai pihak dalam perusahaan. Mekanisme ini dapat dilakukan dengan menerapkan *corporate governance*. Penerapan *corporate governance* dapat memberikan kepercayaan kepada pemilik perusahaan terhadap kemampuan manajemen dalam mengelola kekayaan yang dimiliki oleh pemilik (pemegang saham), sehingga dapat meminimalisasi konflik kepentingan dan biaya keagenan (*agency cost*).

Dalam mengawasi dan memonitor perilaku manajer, pemegang saham harus bersedia mengeluarkan cost pengawasan yang disebut dengan *agency cost* atau biaya keagenan. Untuk mengurangi biaya keagenan dapat dilakukan dengan meningkatkan kepemilikan manajerial, dengan memberikan kesempatan manajer untuk terlibat dalam kepemilikan saham dengan tujuan untuk menyetarakan kepentingan dengan pemegang saham. Dengan keterlibatan pemegang saham, manajer akan bertindak secara hati-hati karena mereka ikut menanggung konsekuensi atas keputusan yang diambilnya. Biaya keagenan juga dapat dikurangi dengan kepemilikan institusional dengan cara mengaktifkan pengawasan melalui investor-investor institusional, dengan kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan terhadap kinerja manajerial. Adanya dewan komisaris yang independen akan meningkatkan kualitas fungsi pengawasan dalam perusahaan. Semakin besar proporsi komisaris independen menunjukkan bahwa fungsi pengawasan akan lebih baik. Dan dengan adanya komite audit dapat membantu dewan komisaris dalam mengawasi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan.

Kinerja keuangan merupakan ukuran keberhasilan atas pelaksanaan fungsi-fungsi keuangan dan hal ini sangat penting, baik bagi investor maupun bagi perusahaan yang bersangkutan. Pentingnya penilaian prestasi kinerja perusahaan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan telah memicu pemikiran para pemimpin perusahaan bahwa mengelola suatu perusahaan di era modern dengan perkembangan teknologi yang pesat menjadi hal yang sangat kompleks. Semakin kompleks aktivitas pengelolaan perusahaan maka akan meningkatkan kebutuhan akan praktik tata kelola perusahaan (*corporate governance*) untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan berjalan dengan baik.

Sektor Industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI merupakan industri yang memproduksi berbagai jenis kebutuhan konsumsi masyarakat. Sektor industri barang konsumsi terdiri dari beberapa subsektor yaitu, subsektor makanan dan minuman, rokok, farmasi, kosmetik, dan peralatan rumah tangga. Produk yang dihasilkan sektor industri ini merupakan kebutuhan sehari-hari manusia sehingga dianggap sebagai sektor yang tangguh dalam menghadapi krisis. Selain itu jumlah produk Indonesia yang besar dimana mencapai 200 juta lebih membuat industri barang konsumsi mempunyai pangsa pasar yang besar dan mempunyai prospek bisnis yang bagus.

Pertumbuhan industri barang konsumsi di Indonesia menunjukkan nilai yang menggembirakan dalam beberapa tahun terakhir. Data BAPEPAM-LK (2012) menunjukkan bahwa industri barang konsumsi terus tumbuh dan semakin diminati. Hal itu dapat terlihat dari pertumbuhan sektoral dari pertumbuhan indeks sektoral barang konsumsi yang tumbuh secara signifikan dibanding sektor lainnya. Walaupun pertumbuhan industri sektor barang konsumsi bagus, sektor

barang konsumsi juga tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang harus diselesaikan agar tidak menghambat pertumbuhannya.

Berdasarkan latar belakang di atas pentingnya mekanisme corporate governance dengan variabel Komisaris independen, Komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan, membuat penulis tertarik untuk menelaah “ Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan?
2. Apakah ada pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan?
3. Apakah ada pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan?
4. Apakah ada pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan?
5. Apakah ada pengaruh secara simultan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan

3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan
4. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan
5. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara simultan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat menambah wawasan kepada pihak perusahaan mengenai pentingnya penerapan *corporate governance* dalam perusahaan

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi input informasi terkait dengan pengambilan keputusan di dalam kegiatan investasi

3. Bagi pihak lain

Dapat digunakan untuk menambah wawasan pengetahuan terapan dan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi atau pembanding yang dapat membantu dalam pengembangan penelitian sejenis.